

Polri Usulkan Jenderal Hoegeng Menjadi Pahlawan Nasional

JAKARTA (IM) - Polri mengajukan Jenderal Polisi (Purn) Hoegeng Imam Santoso, yang merupakan Kapolri ke-5, sebagai pahlawan nasional. Menurut Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo, usulan itu telah disampaikan kepada pemerintah.

“Saat ini Polri telah mengajukan Jenderal Purnawirawan Hoegeng Imam Santoso sebagai pahlawan nasional,” kata Listyo Sigit dalam konferensi pers di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Rabu (27/12).

Selain itu, Polri juga telah membangun patung Jenderal Hoegeng di Pekalongan, Jawa Tengah, untuk memotivasi anggota Polri meladani sosok Hoegeng. Polri juga membuat acara Hoegeng Awards sebagai bentuk apresiasi terhadap anggota Polri yang bekerja dengan baik.

“Kami juga melaksanakan pergelaran Hoegeng Awards

2023. Kegiatan ini diselenggarakan sebagai bentuk apresiasi kepada personel Polri yang telah bekerja melebihi panggilan tugasnya,” ucap Listyo.

Hoegeng Awards tahun ini menambah dua kategori, dari sebelumnya hanya ada tiga kategori. Dua kategori baru itu, yaitu kategori polisi pelindung perempuan dan anak serta polisi tapal batas dan pedalaman. Sementara itu, tiga kategori sebelumnya, yaitu polisi berdedikasi, polisi inovatif, dan polisi berintegritas.

“Saya ingat pada anggota bahwa Hoegeng Awards bukan ajang mencari popularitas, namun lebih bagaimana menanamkan jiwa-jiwa keteladanan dari Jenderal Hoegeng sehingga bisa terinternalisasi pada seluruh personel,” kata Listyo. ● han

MA Tolak Gugatan Terhadap PKPU soal Syarat Usia Capres-Cawapres

JAKARTA (IM) - Mahkamah Agung (MA) menolak gugatan Peraturan KPU Nomor 23 Tahun 2023 soal syarat usia capres-cawapres. Gugatan itu diajukan beberapa orang.

“Tolak permohonan keberatan HUM (hak uji materi-red),” demikian bunyi putusan kasasi yang dilansir websitenya, Rabu (27/12).

Gugatan PKPU Nomor 23/2023 itu diadili dalam 3 perkara. Pertama, dari Amunisi Peduli Demokrasi mengantongi Nomor 48 P/HUM/2023. Dalam putusan itu, diadili ketua majelis Irfan Fachrudin dengan anggota Cerah Bangun dan Yodi Martono Wahyunadi. Sedangkan panitera pengganti Retno Nawangsih.

Kedua, pemohon LBH Yusuf mengantongi nomor perkara 51 P/HUM/2023. Majelis hakim yang mengadili juga sama yaitu Irfan Fachrudin, Cerah Bangun dan Yodi Martono. Tapi untuk panitera pengganti Andi Altika Nuzli.

Dan gugatan ketiga yaitu diajukan oleh Risma Situmorang dkk yang bernaung dalam Tim Advokasi Penjaga

Demokrasi Dan Konstitusi (TAPDK) dengan nomor perkara 52 P/HUM/2023. Perkara ini juga diadili oleh Irfan Fachrudin, Cerah Bangun dan Yodi Martono dengan panitera pengganti Dewi Asminah.

Sebelumnya, Ridwan Darmawan dari TAPDK menyatakan alasan menggugat PKPU Nomor 23 Tahun 2023 karena putusan MK Nomor 90 tahun 2023 yang menjadi acuan atau dasar hukum PKPU 23/2023, diputus oleh hakim MK Anwar Usman dengan cara-cara yang melawan hukum. Yaitu dilakukan dengan melanggar kode etik berat sesuai putusan Majelis Kehormatan MK (MKMK).

“Sehingga seharusnya Putusan MK 90/PUU-XXI/2023 tidak dapat dijadikan dasar pembentukan Peraturan KPU itu. Dengan adanya Putusan MK 90/PUU-XXI/2023 dan Peraturan KPU 23/2023 Demokrasi dan Konstitusi Negara Republik Indonesia telah dicerai sehingga tidak boleh dibiarkan terus berlanjut dan harus dilawan,” kata Ridwan Darmawan dalam gugatannya. ● han

Sahroni Sebut Bakal Terjadi Lonjakan Caleg Stres Digugat Cerai

JAKARTA (IM) - Wakil Ketua Komisi III DPR RI sekaligus Bendahara Umum (Bendum) Partai NasDem, Ahmad Sahroni, menyoroti fenomena calon legislatif yang gagal di Pemilu 2024 pada akhirnya stres dan memantik perceraian.

Ia menyarankan pengadilan agama di seluruh Indonesia bersiap bakal marak caleg yang digugat cerai usai gagal di kontestasi Pemilu. Fenomena ‘caleg stres’ bakal marak terjadi ketika pemilu selesai.

Ia mengatakan proses sosialisasi caleg ke masyarakat tak memakan biaya yang sedikit dan akan berdampak ke perekonomian keluarga apabila mengalami kekalahan.

“Ini fenomena yang unik dan betul-betul terjadi setiap pemilu legislatif diadakan. Jadi, daripada keteteran karena kaget terima banyak permohonan gugatan cerai, pengadilan agama mending bersiap-siap dari sekarang.”

kata Sahroni dalam keterangan tertulisnya, Rabu (27/12).

Sahroni menyebut permohonan gugatan cerai akan meningkat usai pemilu berlangsung. Untuk itu, ia meminta pengadilan menantisipasi hal itu.

“Karena percaya *nggak* percaya, yang beginian banyak bener. Pasti (permohonan gugatan) melonjak, percaya deh,” katanya.

Sahroni mengingatkan para caleg agar berjuang sesuai dengan kemampuan.

“Makanya Bapak Ibu yang nyale, berkampanyelah sesuai kemampuan. Malah kalau bisa, sebelum jadi caleg, Bapak Ibu telah matang secara finansial, tidak masih mikir ini itu,” kata Sahroni.

Sahroni menegaskan bahwa politik bukanlah jalan untuk mengembalikan uang dari modal yang sudah dikeluarkan. Ia menyebut politik bukan tepat untuk mencari kekuasaan. ● han

2 | Polhukam

FOTO: ANTARA



SIDANG PEMBACAAN PUTUSAN PELANGGARAN ETIK FIRLI BAHURI

Ketua Dewan Pengawas KPK Tumpak Hatorangan Panggabean (tengah) bersama anggota Dewan KPK Albertina Ho (kiri) dan Harjono (kanan) memimpin sidang etik dengan agenda pembacaan putusan terkait pelanggaran etik Ketua nonaktif KPK Firlil Bahuri di Kantor Dewan Pengawas KPK, Gedung ACLC KPK, Jakarta, Rabu (27/12). Dewan KPK menjatuhkan sanksi berat terhadap Ketua nonaktif KPK Firlil Bahuri berupa diminta untuk mengundurkan diri sebagai pimpinan KPK karena dinilai terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran kode etik dan kode perilaku terkait pertemuannya dengan mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo.

Firlil Bahuri Dijatuhi Sanksi Berat, Dewan KPK: Tak Ada Hal Meringankan

Sidang etik Firlil Bahuri mengungkapkan bahwa Ketua KPK nonaktif itu, tidak melaporkan uang valuta asing (valas) senilai Rp7,5 miliar ke LHKPN.

JAKARTA (IM) - Sidang Dewan Pengawas (Dewas) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjatuhkan sanksi berat terhadap Ketua KPK nonaktif, Firlil Bahuri, dalam kasus eks Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo (SYL). Dewan KPK memutuskan, Firlil wajib mengundurkan diri sebagai pimpinan KPK.

“Menjatuhkan sanksi berat kepada terdakwa berupa diminta untuk mengajukan pengunduran diri sebagai pimpinan KPK,” kata Ketua Dewan KPK Tumpak Hatorangan Panggabean dalam sidang di Gedung KPK, Jakarta Selatan, Rabu (27/12).

Dewas menyatakan, tak ada hal yang meringankan hukuman Firlil. Sementara, ada sejumlah hal yang memberatkan hukuman, di antaranya, Firlil tidak mengakui

perbuatannya. Firlil juga tidak hadir dalam sidang kode etik dan kode perilaku yang digelar Dewan KPK tanpa alasan yang sah, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut. “Terdapat kesan berusaha memperlambat jalannya persidangan,” ujar Tumpak.

Hal memberatkan lainnya, Firlil tidak menjadi contoh yang baik kepada jajaran KPK.

“Terperiksa sebagai Ketua LPK merangkap anggota seharusnya menjadi contoh dan teladan dalam mengimplementasikan kode etik dan kode perilaku di KPK, tetapi malah terperiksa melakukan sebaliknya,” kata Tumpak.

Selain itu, sanksi etik yang sebelumnya pernah dijatuhkan Dewan ke Firlil juga jadi hal memberatkan. Dewas menyatakan, Firlil melanggar kode etik dan kode perilaku

karena berhubungan dengan Syahrul Yasin Limpo yang saat itu masih menjabat sebagai Menteri Pertanian.

Komunikasi antara Firlil dan Syahrul terjadi ketika KPK menanganai perkara dugaan korupsi di Kementerian Pertanian. Firlil pun disebut tak memberitahukan ihwal komunikasi ini ke pimpinan KPK lainnya.

Tak Laporkan Valas Rp7,5 M Sidang etik Firlil Bahuri mengungkapkan bahwa Ketua KPK nonaktif itu, tidak melaporkan uang valuta asing (valas) senilai Rp7,5 miliar ke Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN).

Anggota majelis sidang, Harjono menjelaskan Firlil tak melaporkan ke LHKPN karena uang valas yang diterimanya jauh sebelum ia bertugas di KPK. Ia mengatakan bahwa uang valas tersebut digunakan untuk keperluan pribadinya. Salah satunya untuk kebutuhan sekolah anak.

“Uang valas tersebut terperiksa gunakan untuk kebutuhan pribadi, di luar keper-

luan dinas setelah diperiksa pensiun. Salah satunya untuk kebutuhan keperluan sekolah anak diperiksa,” kata Harjono.

Anggota majelis sidang lainnya, Albertina Ho mengatakan bahwa uang valas tersebut diterima Firlil ketika ia masih

bertugas di Polri. Saat itu, Firlil acap kali pergi ke luar negeri untuk melaksanakan tugas. Ia juga mengeskakan uang valas yang diterima Firlil bukanlah sebagai bentuk gratifikasi.

“Pemberian uang valas kepada terdakwa bukan gratifikasi,” tegasnya. ● han

Prabowo Janji Jika Menang Pilpres, Ajak Pesaing Ikut Berbakti ke Rakyat

BANDUNG (IM) - Calon Presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto menghadiri deklarasi nasional Gerakan Muslim Persatuan Indonesia Cinta Tanah Air (Gempita) di Kota Bandung, Rabu (27/12). Pada kesempatan itu, Prabowo bicara jika dirinya terpilih menjadi Presiden 2024-2029.

Prabowo dalam sambutannya usai acara deklarasi, awalnya bicara tentang perjalanannya di dunia politik, termasuk ketika kalah dua kali dalam Pilpres 2014 dan 2019.

Prabowo juga menceritakan proses ketika diajak Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk bergabung ke pemerintahan. Menurutnya saat itu, Jokowi memberikan kesempatan dirinya untuk berbakti kepada negara.

“Dua kali Pemilu saya bertanding lawan Pak Jokowi, dua kali kalah. Tapi yang terakhir, begitu beliau menang, beliau mengajak saya bersatu, beliau mengajak pesaing beliau, lawan tanding beliau, diajak bersatu untuk sama-sama berbakti dan mengabdikan kepada rakyat Indonesia,” ucap Prabowo.

Prabowo menyebut, apa yang dilakukan Jokowi pada Pilpres 2019 itu adalah tekad dari Koalisi Indonesia Maju di Pilpres 2024 nanti. Karena itu, Prabowo mengungkapkan jika terpilih jadi presiden nanti, dia juga bakal merangkul pesaing yang ada.

“Ini pelajaran dan ini juga tekad saya dan tekad Koalisi Indonesia Maju demi rakyat dan bangsa Indonesia. Bila mana insyaallah menerima mandat, kita pun akan mengajak semua kekuatan bersama-sama berbakti ke rakyat Indonesia,” tegas Prabowo disambut tepuk tangan ribuan relawan.

Meski begitu, Ketum Partai Gerindra ini menyatakan, jika ada pihak yang tetap ingin menjadi oposisi, dirinya tidak keberatan. Yang terpenting kata Prabowo, oposisi yang ada harus cinta tanah air.

“Yang mau tetap beroposisi kita butuh juga oposisi, tetapi oposisi yang cinta tanah air, yang sama-sama mengoreksi, mengkritisi, tapi cinta tanah air, cinta bangsa dan rakyat, ini tujuan kita,” tandasnya. ● han

Ganjar Pranowo Berkomitmen Optimalkan Potensi Desa Wisata di Seluruh Indonesia

KLATEN (IM) - Calon presiden (capres) nomor urut 3, Ganjar Pranowo berkomitmen untuk terus mengembangkan dan mengoptimalkan potensi desa wisata di seluruh Indonesia. Untuk itu, diperlukan penggenjotan event dan interkoneksi dengan pelaku wisata agar desa semakin maju.

Menurut Ganjar tidak hanya potensi wisata dari sebuah desanya saja yang bisa ditonjolkan, tetapi juga budaya lokal, wisata alam hingga destinasi wisata buatan.

Hal itu disampaikan Ganjar saat mengunjungi Objek Air Mata Cokro (OMAC), Kecamatan Tulung, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah pada Rabu (27/12).

“Ada potensi wisata yang ada di Indonesia apakah itu budaya, wisata alam maupun artificial. Di sisi lain tentu event, itu perlu diciptakan. Yang jadi problem adalah interkoneksi, sehingga paket wisata tidak ada interkoneksi, selebihnya adalah kerja sama dengan pelaku pariwisata,” ujar Ganjar.

Sebelumnya, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) RI merilis 10 destinasi pariwisata prioritas (DPP) di Indonesia, yakni Danau Toba (Sumut),

Candi Borobudur (Jateng), Mandalika (NTB), Labuan Bajo (NTT), Likupang (Sulut), Tanjung Kelayang (Babel), Bromo (Jatim), Wakatobi (Sulteng), Morotai (Malut) dan Raja Ampat (Papua).

Jika terpilih menjadi Presiden, Ganjar menyebutkan bakal mengoptimalkan ke-10 DPP itu agar Indonesia nantinya bisa lebih menjadi primadona wisata warga dunia. Ganjar juga mendorong 10 DPP itu bisa menjadi acuan untuk daerah lain, khususnya terkait pengembangan desa wisata di sekitarnya untuk lebih dikembangkan oleh pemerintah.

“10 destinasi itu mesti dituntaskan, kalau itu terjadi itu dijadikan benchmark untuk yang lain. Maka itu bisa menjadi babonnya, sehingga yang lain bisa mengikuti,” kata Ganjar.

Adapun upaya peningkatan desa wisata di Jawa Tengah pernah dilakukan Ganjar saat menjadi Gubernur Jawa Tengah selama dua periode.

Melalui UU BUMDES (Badan Usaha Milik Desa), Ganjar menyalurkan bantuan dana desa Rp1 miliar untuk 1 desa wisata di Jawa Tengah untuk memantik daerah lain bisa mencontoh desa wisata tersebut. ● mei

Cak Imin Sindir ‘Tetangga Sebelah’ yang Menyesal Tak Ikut Perubahan

JAKARTA (IM) - Calon Wakil Presiden nomor urut 1, Muhaimin Iskandar atau Cak Imin, mengajak semua pihak untuk terlibat dalam gerakan perbaikan dan perubahan. Dia menyinggung ada ‘tetangga sebelah’ yang menyesal tidak ikut dalam koalisi perubahan.

Hal itu disampaikan Cak Imin saat deklarasi dukungan keluarga besar Himpunan Mahasiswa Islam di Jakarta, Rabu (27/12). Cak Imin mengatakan, tahun 2024 merupakan momentum wajib untuk menghadirkan totalitas perbaikan dan perubahan.

“Selama ini aktivis HMI, aktivis PMII seperti saya, mengikuti arus jalannya perkembangan dengan kategori semaksimal mungkin bisa mewarnai. Tapi ke depan 2024 bukan hanya semaksimal mungkin, kita wajib

menghadirkan totalitas perbaikan dan perubahan secara nyata. Inilah saatnya, inilah kesempatannya, inilah waktunya. Jangan menyesal seperti tetangga sebelah. Diberi kesempatan, diberi peluang, tidak digunakan,” kata Cak Imin tanpa memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai istilah tetangga sebelah tersebut.

Cak Imin mengingatkan sejauh ini masih ada yang berpikir perubahan bukan suatu keharusan. Dia pun menekankan kepada yang tidak ingin perubahan untuk tidak menyesal di kemudian hari.

“Artinya, kalau yang masih mengagap perubahan ini bukan sesuatu yang urgen, jangan salahkan kalau suatu hari menyesal dan menyesal kembali akan keadaan yang sulit dan akan menjadikan bahaya bagi bangsa kita,” ucap

Cak Imin. Dia meyakinkan bahwa pasangan AMIN mampu membawa Indonesia lebih adil dan makmur. Cak Imin mengatakan keadaan sulit saat ini bakal berubah dengan solusi yang dihadirkan pasangan AMIN.

Dalam acara ini, ada 11 alumni keluarga besar HMI yang menjadi inisiator deklarasi, yakni Chumaidi Syarif Romas, Zubairi Djoerban, Abdullah Hehamahua, Faslil Djalal, Hamdan Zoelva, Didin S Damanhuri, Nurhayati Djamas, Sarinandhe Djibran, Sofian Effendi, Widi Agus Pratikto dan Kang Jana Tea.

Cak Imin mengapresiasi dukungan tersebut. Dia menjadikan dukungan itu sebagai semangatnya dalam memimpin tanggung jawab pemimpin nasional. ● mei

PENGUMUMAN

Guna memenuhi ketentuan Pasal 127 ayat (2) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UUPT”), Direksi PT. TEKNOLOGI HARAPAN LESTARI, berkedudukan di Kabupaten Tangerang.

(“Perseroan”) dengan ini mengumumkan bahwa SPRING CAPITAL PTE, LTD akan mengambil alih saham sebanyak 4.200 saham milik PT. TOMMY HERMAWAN dalam Perseroan.

Pengambilan 4.200 saham dalam Perseroan secara langsung dari para pemegang saham Perseroan sesuai ketentuan Pasal 125 ayat (1) UUPT juncto Pasal 127 (8) UUPT.

Semua kreditor Perseroan dan pihak terkait yang keberatan dapat mengajukan keberatan secara tertulis dengan disertai alasan dan bukti-bukti pendukung yang sah selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah pengumuman ini disampaikan kepada Direksi PT. TEKNOLOGI HARAPAN LESTARI, di Lantai 2 One PM Building, Jalan Gading Serpong Boulevard Blok M5 Nomor 18, Curug Sangereng, Kelapa Dua, Tangerang.

20 November 2023

PT. TEKNOLOGI HARAPAN LESTARI

Direksi



DUKUNGAN KELUARGA BESAR HMI UNTUK AMIN

Capres nomor urut 1 Anies Baswedan (kanan) bersama cawapres nomor urut 1 Muhaimin Iskandar (tengah) menerima berkas deklarasi dukungan dari Keluarga Besar Himpunan Mahasiswa Islam (KB HMI) di Jakarta, Rabu (27/12). KB HMI menyatakan dukungan untuk kemenangan Anies-Muhaimin (AMIN) sebagai Presiden dan Wakil Presiden pada Pilpres 2024.